



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
TAHUN 2019-2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
7. Menteri Luar Negeri;
8. Menteri Perdagangan;
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Menteri Ketenagakerjaan;
11. Menteri Dalam Negeri;
12. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Sekretaris Kabinet;
14. Kepala Badan Informasi Geospasial;
15. Para Gubernur;
16. Para Bupati/Walikota;

Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, yang terdiri atas:

1. Melakukan penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
3. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
4. Menerapkan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
5. Melakukan dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) dan meningkatkan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit,

dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, dan bupati/walikota daerah penghasil kelapa sawit yang ditunjuk dalam Instruksi Presiden ini dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024; dan
 - b. membentuk Tim Nasional untuk pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.

2. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara berkoordinasi sesuai kewenangan masing-masing merencanakan dan mengalokasikan pembiayaan pada bagian anggaran kementerian dan lembaga dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menteri Pertanian:
 - a. melakukan penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit yang berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Badan Informasi Geospasial sesuai kewenangan;
 - b. meningkatkan sosialisasi tentang regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya;
 - c. meningkatkan kepatuhan hukum pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif;
 - d. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat dan menerapkan praktik budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices*);
 - e. meningkatkan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun;
 - f. mendorong ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- f. mendorong percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun;
 - g. meningkatkan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit;
 - h. melaksanakan pencegahan kebakaran kebun dan lahan yang berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah serta instansi lain terkait;
 - i. melaksanakan penurunan emisi gas rumah kaca di kebun dan lahan;
 - j. mendorong pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk meningkatkan rantai nilai ekonomi;
 - k. mendorong percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat; dan
 - l. melakukan sosialisasi Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) untuk pemangku kepentingan nasional dan melakukan percepatan pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) untuk perusahaan dan pekebun.
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
- a. meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan kelapa sawit;
 - b. menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan dan pada ekosistem gambut; dan
 - c. melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. melakukan pengukuran, pelaporan dan verifikasi (*measurement, reporting, and verification/MRV*) potensi penurunan emisi gas rumah kaca di perkebunan kelapa sawit.
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional:
 - a. meningkatkan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca dalam perkebunan kelapa sawit;
 - b. melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain; dan
 - c. legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan.
6. Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan berkoordinasi sesuai kewenangan masing-masing melakukan diplomasi, promosi, dan advokasi menuju keberterimaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) oleh pasar internasional.
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral meningkatkan pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi.
8. Menteri Ketenagakerjaan melakukan review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem keselamatan dan kesehatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit.
9. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

9. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.
10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit.
11. Kepala Badan Informasi Geospasial melakukan pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit.
12. Gubernur:
 - a. menyusun Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat provinsi penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah provinsi yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
 - b. membentuk tim pelaksana daerah dalam rangka pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang melibatkan para pihak terkait (forum multi pihak).
13. Bupati/Walikota:
 - a. menyusun Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat kabupaten/kota penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
 - b. membentuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. membentuk tim pelaksana daerah dalam rangka pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang melibatkan para pihak terkait (forum multi pihak).

KETIGA : Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 dapat mengikutsertakan peran masyarakat, pelaku usaha, dan para pihak terkait (*stakeholders*) perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : a. Menteri, kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota melaporkan hasil pelaksanaan capaian Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan kepada Presiden pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KELIMA : Pembiayaan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian dan lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Satya Bhakti Parikesit



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN TAHUN 2019-2024

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
1.	Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik	1.1. Penyusunan pedoman pendataan pekebun	Tersusunnya pedoman pendataan pekebun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	2019	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Salinan sesuai
dengan aslinya

2

3. Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
						3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Badan Informasi Geospasial 5. Badan Pusat Statistik 6. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 7. Pemerintah Provinsi 8. Pemerintah Kabupaten/Kota

9. Pelaku ...

Selamat sesuai
dengan aslinya

10/10/2020



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		1.2. Melakukan pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	Tersedianya IGT tutupan kebun kelapa sawit yang termutakhir	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Badan Informasi Geospasial 4. Badan Pusat Statistik 5. Pemerintah Provinsi 6. Pemerintah Kabupaten/Kota

7. Pelaku ...

Salinan sesuai dengan aslinya

2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		1.3. Melakukan pendataan pekebun dan pemetaan lokasi kebunnya, yang diperbarui secara berkala	1.3.1. Tersedianya data pekebun dan peta lokasi kebunnya yang diperbarui secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit 1.3.2. Tersedianya peta indikatif dari kebun-kebun yang sudah perlu diremajakan di 21 provinsi	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 4. Badan Informasi Geospasial

Salinan sesuai dengan aslinya

2019.05.20

5. Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
2.	Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	2.1. Kompilasi dan pengintegrasian IGT tutupan kebun sawit dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) terkait perkebunan kelapa sawit	Tersedianya IGT tutupan kebun sawit yang terintegrasi	2019-2024	Badan Informasi Geospasial	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional

Salinan sesuai dengan aslinya

02/05/2024

3. Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		2.2. Menyusun pedoman atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pemetaan partisipatif	Tersedianya pedoman atau NSPK pemetaan partisipatif	2021	Badan Informasi Geospasial	<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Pertanian2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional3. Kementerian ...3. Kementerian ...4. Kementerian Dalam Negeri5. Pemerintah Provinsi6. Pemerintah Kabupaten/Kota7. Pelaku Usaha

Salinan sesuai dengan aslinya

1000000000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		2.3. Melakukan pelatihan pemetaan partisipatif bagi organisasi perangkat daerah terkait, perusahaan dan masyarakat di lokasi perkebunan	2.3.1. Tersedianya fasilitator pemetaan partisipatif 2.3.2. Terlaksananya pemetaan partisipatif di daerah percontohan	2020-2024 2020-2024	Badan Informasi Geospasial	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Kementerian ...

Salinan sesuai dengan aslinya

11/01/2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
3.	Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya	3.1. Menyusun strategi komunikasi dan rencana sosialisasi yang efektif bagi pekebun dan para pemangku kepentingan lainnya	Terbitnya strategi komunikasi dan rencana sosialisasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2019-2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Salinan sesuai dengan aslinya

01010001

4. Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
						<ol style="list-style-type: none">4. Kementerian Komunikasi dan Informatika5. Kementerian Ketenagakerjaan6. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit7. Pemerintah Provinsi8. Pemerintah Kabupaten/Kota9. Pelaku Usaha

3.2. Melaksanakan ...

Salinan sesuai
dengan aslinya



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		3.2. Melaksanakan sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi	Terselenggaranya sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi di tingkat pusat dan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika 5. Kementerian Ketenagakerjaan 6. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 7. Pemerintah ...

Salinan sesuai dengan aslinya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
4.	Peningkatan sinergitas antar kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit	4.1. Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan secara berkala	Kebijakan yang sudah disinkronisasi	2019 – 2024	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 4. Kementerian Perdagangan

Salinan sesuai dengan aslinya

5. Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		4.2. Sinkronisasi data dan informasi pada masing-masing kementerian/lembaga	Tersedianya data dan informasi yang telah disinkronisasi pada masing-masing kementerian/lembaga	2019 - 2024	Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional2. Kementerian Keuangan3. Kementerian Pertanian4. Kementerian ...

Salinan sesuai dengan aslinya





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
						4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 6. Kementerian Perdagangan 7. Kementerian Dalam Negeri 8. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 9. Badan Informasi Geospasial

10. Badan ...

Salinan sesuai dengan aslinya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
5.	Pembentukan tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	Membentuk tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	Terbentuknya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2020	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Pelaku Usaha

Sahman sesuai
dengan aslinya

2020

6. Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
6.	Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	Terbangunnya jalan yang memenuhi standar di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	2019 - 2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Dalam Negeri2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional3. Kementerian Pertanian4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

5. Badan ...

Salinan sesuai
dengan aslinya

11/01/2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
7.	Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif	7.1. Membentuk kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	2020	Kementerian Pertanian	5. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 6. Pemerintah Provinsi 7. Pemerintah Kabupaten/Kota
						1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

3. Kementerian ...

Salinan sesuai
dengan aslinya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		7.2. Meningkatkan jumlah dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Meningkatnya jumlah dan kompetensi PPNS dari 28 orang menjadi 100 orang PPNS untuk 21 provinsi	2020 - 2024	Kementerian Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi4. Kementerian ...

Salinan sesuai
dengan aslinya

10/10/2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-18-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
B. PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN						
8.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat	8.1. Melakukan sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat bagi pekebun	Terselenggaranya sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat di 21 provinsi	2019 – 2024	Kementerian Pertanian	1. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 2. Pemerintah ...

Salinan sesuai
dengan aslinya

2019/01/17



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-19-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		8.2. Melakukan sosialisasi program kemitraan antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMN Perkebunan	Terselenggaranya sosialisasi program kemitraan di 21 provinsi antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih b. produsen benih yang membesarkan benih dan/atau c. BUMN Perkebunan	2020-2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Pelaku Usaha

8.3. Mengembangkan ...

Salinan sesuai dengan aslinya

10/10/2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		8.3. Mengembangkan program kemitraan antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih; b. produsen benih yang membesarkan benih; dan/atau c. BUMN Perkebunan	Terjalinya kerja sama kemitraan di 21 provinsi antara: a. produsen benih yang memiliki kebun sumber benih; b. produsen benih yang membesarkan benih; dan/atau c. BUMN Perkebunan	2019-2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Pelaku Usaha Perusahaan Produsen Benih

8.4. Memfasilitasi ...

Salinan sesuai
dengan aslinya

10/01/2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-21-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		8.4. Memfasilitasi peningkatan komitmen produsen benih yang membesarkan benih siap salur untuk menjual benih bersertifikat	Terwujudnya perjanjian antara produsen benih yang membesarkan benih siap salur dengan produsen benih yang memiliki kebun menjual benih bersertifikat di 21 provinsi	2019-2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Pelaku Usaha Perusahaan Produsen Benih
		8.5. Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam	Terlaksananya penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam di 21 provinsi secara berkala	2019-2024	Kementerian Pertanian	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota

9. Peningkatan ...

Salinan sesuai dengan aslinya

2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
9.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices / GAP)	9.1. Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	Tersusunnya pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	2020	Kementerian Pertanian	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Pelaku Usaha
		9.2. Melakukan pelatihan GAP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baik oleh pemerintah, maupun mitraan para pihak secara periodik	Tersusunnya pelatihan GAP di tingkat nasional dan provinsi baik oleh pemerintah, maupun mitraan para pihak secara periodik.	2020 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Pelaku Usaha
		9.3. Meningkatkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	Meningkatnya kompetensi dibidang perkebunan kelapa sawit	2020 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Salinan sesuai dengan aslinya

2. Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-23-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
10.	Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun	10.1. Meningkatkan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/ lembaga keuangan lainnya	Tertindakannya kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP pada 500 kelompok pekebun di 21 provinsi	2020 – 2024	Kementerian Pertanian	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Pelaku Usaha
		9.4. Menyelenggarakan penyuluhan tentang prinsip GAP bagi pekebun	Tertindakannya kegiatan penyuluhan tentang prinsip GAP pada 500 kelompok pekebun di 21 provinsi			1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Salinan sesuai dengan aslinya

3. Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-24-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		10.2. Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	Meningkatnya jumlah pekebun yang mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat di 21 provinsi	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha

10.3. Meningkatkan ...

Salinan sesuai dengan aslinya

02/07/2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-25-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		10.3. Meningkatkan dukungan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan mempertimbangkan ketersediaan dana	Meningkatnya dukungan ketersediaan dana untuk PSR dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan sumber lain yang sah	2019 – 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Pelaku Usaha
		10.4. Meningkatkan kelancaran dalam penyaluran dana PSR kepada pekebun	Meningkatnya realisasi penyaluran dana peremajaan kepada pekebun di 21 provinsi	2019 – 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah ...

Salinan sesuai dengan aslinya

01/03/2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-26-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		10.5. Melakukan evaluasi pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat	Terseadinya laporan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tindak lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat di 21 provinsi	2019 – 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha

11. Percepatan ...

Salinan sesuai dengan aslinya

11. Percepatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-27-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
11.	Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun	11.1. Sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun	11.1.1. Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala 11.1.2. Terbentuknya lembaga pekebun yang berbadan hukum dalam bentuk Koperasi, dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2019 – 2023	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota 6. Pelaku Usaha

11.2. Memperkuat ...

Salinan sesuai
dengan aslinya

11.2.2.1.1.1.1



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-28-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		11.2. Memperkuat kelembagaan pekebun	Meningkatnya kemampuan manajerial pengurus lembaga pekebun dalam mengelola usaha di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota 6. Pelaku Usaha

11.3. Menyusun ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-29-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		11.3. Menyusun petunjuk teknis jual beli Tandani Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun	Tersedianya petunjuk teknis jual beli TBS kelapa sawit produksi pekebun	2020	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Perdagangan 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha
		11.4. Melakukan pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun	Tersedianya laporan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah 2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 3. Pemerintah ...

Salinan sesuai dengan aslinya

11/11/2020



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-30-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
12.	Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit	12.1. Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan secara berkala	Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2019-2024	Kementerian Pertanian	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Pelaku Usaha

12.2. Meningkatkan ...

Salinan sesuai
dengan aslinya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-31-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		12.2. Meningkatkan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan	Meningkatnya jumlah pelatihan bagi penyuluh pertanian bidang perkebunan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2019-2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Pelaku Usaha
		12.3. Meningkatkan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit	Tertelaksananya penyuluhan kepada pekebun kelapa sawit oleh penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Pelaku Usaha

12.4. Melakukan ...

Salinan sesuai dengan aslinya

30/01/2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-32-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		12.4. Melakukan penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu pusat kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit	Tersebutnya BPP yang memiliki kemampuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2020 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Pelaku Usaha
C. PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN						
13.	Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan	13.1. Menyusun regulasi perlindungan kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	Terbitnya regulasi perlindungan KEE dan pedoman teknis ABKT	2019 - 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Badan ...

Salinan sesuai dengan aslinya

3. Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-33-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		13.2. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan	13.2.1. Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan pengelolaan keanekaragaman hayati di 26 provinsi penghasil kelapa sawit 13.2.2. Tersedianya data jumlah	2019 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota

Selama sesuai dengan aslinya

13.2.2.2

perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-34-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		13.3. Melakukan sosialisasi KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	Terselenggaranya sosialisasi tentang KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	2019 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha

13.4. Meningkatkan ...

Salinan sesuai dengan aslinya

13.4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-35-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		13.4. Meningkatkan jumlah Forum Kolaborasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Meningkatnya jumlah Forum Kolaborasi pengelola KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten penghasil kelapa sawit yang memiliki peran secara efektif dari 48 menjadi 83 forum	2019-2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Pertanian2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional3. Badan Restorasi Gambut4. Pemerintah Provinsi5. Pemerintah Kabupaten/Kota6. Pelaku Usaha

13.5. Meningkatkan ...

Salinan sesuai
dengan aslinya

13.5. Meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-36-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		13.5. Meningkatkan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Terlaksananya peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi DAS	2019-2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha
		13.6. Menyusun pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun	13.6.1. Tersedianya pedoman rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun di	2019 – 2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Salinan sesuai dengan aslinya

provinsi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-37-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
14.	Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran kebun dan lahan	14.1 Memberikan dukungan sarana prasarana untuk pekebun dalam	provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit 13.6.2. Tersedianya rencana dan implementasi perlindungan dan pengelolaan restorasi gambut oleh perusahaan dan pekebun di provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	2019 - 2020	Kementerian Pertanian	3. Badan Restorasi Gambut 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota 6. Pelaku Usaha
			Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun yang menerapkan PLTB di	2020-2024		1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Salinan sesuai dengan aslinya

14.1

penerapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-38-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit yang rawan kebakaran secara berkelanjutan			
		14.2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keajiban setiap perusahaan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 3. Badan ...

Salinan sesuai
dengan aslinya

✓



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-39-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		14.3. Meningkatkan kerja sama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	14.3.1. Terbentuknya KTPA di sekitar perkebunan kelapa sawit 14.3.2. Terlaksananya kerja sama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak di sekitar	2019 – 2024 2019 – 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Salinan sesuai dengan aslinya

perkebunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-40-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		14.4. Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (<i>hotspot</i>) kebakaran lahan dan kebun	Terlaksanannya tindak lanjut hasil pemantauan titik api (<i>hotspot</i>) kebakaran lahan dan kebun secara berkala	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 3. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 4. Lembaga ... 4. Badan Restorasi Gambut 5. Pemerintah Provinsi 6. Pemerintah Kabupaten/Kota 7. Pelaku Usaha

Salinan sesuai dengan aslinya





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-41-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		14.5. Menyusun peraturan terkait KTPA	Terbitnya peraturan terkait KTPA	2019-2024	Kementerian Pertanian	4. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 5. Pemerintah Provinsi 6. Pemerintah Kabupaten/Kota 7. Pelaku Usaha 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Salinan sesuai dengan aslinya

3. Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-42-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
15.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan	15.1. Melakukan penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit yang disepakati secara nasional dan diakui secara internasional	2021-2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Pertanian2. Badan Restorasi Gambut3. Pemerintah Provinsi4. Pemerintah Kabupaten/Kota5. Pelaku Usaha6. Pelaku Usaha

Salinan sesuai dengan aslinya

15.2. Penyusunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-43-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		15.2. Penyusunan pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit	Tersedianya pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit	2021-2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Badan Restorasi Gambut 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha
		15.3. Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik	Tersedianya laporan inventarisasi emisi GRK, <i>baseline</i> , dan target penurunan emisi pada perkebunan secara periodik	2021-2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Badan Restorasi Gambut 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha

15.4. Menyusun ...

Salinan sesuai dengan aslinya

15.4.4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-44-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		15.4. Menyusun <i>database</i> nasional terkait nilai simpanan karbon dan emisi GRK kelapa sawit	Tersusunnya <i>database</i> nilai simpanan karbon dan emisi GRK yang dihasilkan oleh sektor perkebunan kelapa sawit	2021-2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Badan Restorasi Gambut 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha
		15.5. Menyusun rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi dari perkebunan sawit	2021 – 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Badan Restorasi Gambut 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah ...

Salinan seikat
dengan salinya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-45-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		15.6. Pelaksanaan aksi mitigasi, pemantauan, dan verifikasi penurunan emisi GRK di perkebunan sawit	Laporan potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	2021 – 2024	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Badan Restorasi Gambut 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha

Salinan sesuai dengan aslinya

16. Pengukuran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-46-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
16.	Pengukuran, pelaporan dan verifikasi (measurement, reporting, and verification/MRV) potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	16.1. Melaksanakan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit 16.2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penurunan emisi GRK	16.1.1. Tersedianya laporan hasil MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit di 26 provinsi 16.1.2. Terverifikasinya penurunan emisi di perkebunan kelapa sawit	2021 - 2024 2021 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Badan Restorasi Gambut 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha

4. Pemerintahah ...

Salinan sesuai dengan aslinya

10/10/2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-47-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
17.	Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit	17.1. Melakukan identifikasi lahan kritis maupun status kepemilikan di dalam dan/atau di luar kawasan hutan	Tersedianya data lahan kritis dan status kepemilikan di dalam dan/atau di luar kawasan hutan yang diperbaharui secara berkala	2020 - 2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Pertanian 3. Badan Restorasi Gambut 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota 6. Pelaku Usaha

17.2. Menyusun ...

Salinan sesuai dengan aslinya

1 2 3 4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-48-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		17.2. Menyusun regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efektivitas pengelolaan lahan kritis	Tersusunnya regulasi dan petunjuk teknis terkait pemberian peluang pengelolaan lahan kritis	2020	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Pertanian 3. Badan Restorasi Gambut 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota 6. Pelaku Usaha
		17.3. Membangun data dasar pertanahan dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya data dasar pertanahan dan lahan kritis di sektor perkebunan kelapa sawit	2020-2022	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian ...

Salinan sesuai dengan aslinya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-49-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		17.4. Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	Tersedianya kajian tentang sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	2020-2022	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Pertanian 3. Badan ...

Selamat sesuai
dengan aslinya

17-09-2022

3. Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-50-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
18.	Pemanfaatan limbah Kelapa sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi	18.1. Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	Tersedianya hasil kajian dan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk berbagai kepentingan	2019-2022	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Badan ...

Salinan sesuai dengan aslinya

2022



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-51-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		18.2. Mengembangkan strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	Tersedianya strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, dan nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	2019-2022	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 4. Pelaku Usaha

18.3. Meningkatkan ...

Salinan sesuai dengan aslinya

✓



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-52-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
19.	Peningkatan pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi	Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan <i>Palm Oil Mill Effluent (POME)</i> sebagai energi terbarukan	19.1.1. Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan POME sebagai energi alternatif	2020-2024	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 4. Pelaku Usaha

19.1.2. Meningkatkan ...

Salinan sesuai
dengan aslinya

19.1.2. Meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-53-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
			19.1.2. Meningkatkan jumlah kerjasama perusahaan kelapa sawit dengan Perusahaan Listrik Negara dalam pemanfaatan pemanfaatan POME sebagai energi terbarukan			3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota 6. Pelaku Usaha
D. TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA						
20.	Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat	20.1. Melakukan review terhadap regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	Tersedianya rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan regulasi fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	2019-2021	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3. Kementerian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-54-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		20.2. Melakukan konsultasi publik mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan	Terdapatnya umpan balik dari para pemangku kepentingan mengenai rancangan peraturan tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan	2019-2020	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3. Kementerian ...

Selamat sesuai
dengan akunya

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-55-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
21.	Melakukan penangananan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain	21.1. Membentuk tim mediasi penangananan sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penangananan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain	21.1.1. Terbentuknya tim mediasi penangananan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain 21.1.2. Tersedianya tim mediasi yang memiliki	2020-2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Pemerintah Provinsi

Salinan sesuai dengan aslinya

kemampuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-56-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		21.2. Melakukan penanganan sengketa lahan melalui mediasi	Tersedianya hasil penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	2020-2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota

21.3. Melakukan ...

Salinan sesuai dengan aslinya

2020-2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-57-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
22.	Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	22.1. Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	21.3.1. Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi penanaman sengketa lahan 21.3.2. Berkurangnya sengketa lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit	2020 – 2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Salinan sesuai
dengan aslinya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-58-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		22.2. Menyelesaikan keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	Terselesaikannya keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	2019 - 2021	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Pertanian2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional3. Pemerintah Provinsi4. Pemerintah Kabupaten/Kota

22.3. Melaksanakan ...

Selamat sesuai
dengan aslinya

2020/08/11



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-59-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		22.3. Melaksanakan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	22.3.1. Tersedianya data lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan 22.3.2. Tersedianya peta indikatif dan permasalahan lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	2019 - 2021	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota

22.3.3. Tersedianya ...

Salinan sesuai dengan aslinya

2019-2021



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-60-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		22.4. Melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan	22.3.3. Tersedianya database dan hasil verifikasi data kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi didalam kawasan hutan	2019 - 2021		
		22.4. Melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan	Terbitnya izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan	2019 - 2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 3. Pemerintah Provinsi

Salinan sesuai dengan aslinya

yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-61-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
23.	Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan	23.1. Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	2020 - 2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Pertanian2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan3. Kementerian Dalam Negeri4. Pemerintah Provinsi5. Pemerintah Kabupaten/Kota

23.2. Melakukan ...

Salinan setiap
dengan aslinya

2023



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-62-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
24.	Penyelesaian status lahan usaha perkebunan yang terindikasi di ekosistem gambut	24.1. Menata lahan usaha perkebunan dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut 23.2. Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	Diterapkannya usaha perkebunan yang “ <i>clear and clean</i> ” dengan sistem tata kelola (tata hidrologi) ekosistem gambut Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	2019-2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Pemerintah Provinsi 5. Pemerintah Kabupaten/Kota

4. Pemerintah ...

Salinan sesuai
dengan aslinya

2023/11/15
15:00:00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-63-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		24.2. Melakukan pendataan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	24.2.1. Tersedianya data lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut 24.2.2. Tersedianya peta indikatif kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	2019-2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota

Salinan sesuai dengan aslinya

24.2.3. Tersedianya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-64-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
25.	Pelaksanaan review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial	25.1. Melakukan review terhadap regulasi ketenagakerjaan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit	24.2.3. Tersedianya rekomendasi penyelesaian hasil identifikasi kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di ekosistem gambut	2019-2023	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian Pertanian 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota

Salinan sesuai dengan aslinya

03/11/2020

Tenaga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-65-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
	Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit	25.2. Meningkatkan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2020-2024	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian Pertanian 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Pelaku Usaha
		25.3. Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan	Terselenggaranya sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	2019 - 2024	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian Pertanian 2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha

25.4. Pengawasan ...

Salinan sesuai
dengan aslinya

2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-66-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		25.4. Pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit pada 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	2019-2024	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Kementerian Pertanian 2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 3. Pemerintah Provinsi 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Pelaku Usaha

E. DUKUNGAN ...

Salinan sesuai dengan aslinya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-67-

E. DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT

26. Pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan nasional	26.1. Menyusun peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Tersedianya peta jalan strategi komunikasi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota	2020-2023	Kementerian Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Perdagangan2. Badan Standardisasi Nasional3. Pemerintah Provinsi4. Pemerintah Kabupaten/Kota5. Pelaku Usaha
	26.2. Meningkatkan frekuensi sosialisasi sistem sertifikasi ISPO	26.2.1. Meningkatkan jumlah para pihak yang memahami pentingnya sertifikasi ISPO		2019 – 2024	Kementerian Pertanian

Selain sesuai dengan aslinya



26.2.2. Meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-68-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
27.	Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun	<p>27.1. Melakukan pendampingan/ penyuluhan bagi pekebun untuk pemenuhan sertifikasi ISPO</p> <p>27.2. Meningkatkan jumlah dan kapasitas Petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) dan dana Pemerintah Daerah</p>	<p>26.2.2. Meningkatkan jumlah perusahaan dan pekebun yang mendapat sertifikat ISPO</p> <p>Meningkatnya jumlah pekebun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO</p>	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Pemerintah Provinsi2. Pemerintah Kabupaten/ Kota3. Pelaku Usaha

Salinan sesuai dengan aslinya

untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-69-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		untuk proses penilaian kebun sebagai prasyarat mendapatkan sertifikat ISPO	penilaian usaha perkebunan 27.2.2. Meningkatkan jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun	2019 - 2024		
		27.3. Menyusun panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk memperoleh sertifikat ISPO	Tersusunnya panduan kemitraan antara perusahaan dan pekebun untuk mendapatkan sertifikat ISPO	2020-2022	Kementerian Pertanian	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota

Salinan sesuai
dengan aslinya

27.4. Menyelenggarakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-70-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		27.4. Menyelenggarakan pelatihan ISPO untuk petugas di provinsi dan kabupaten/kota	Meningkatnya jumlah petugas pendamping untuk sertifikasi ISPO	2019 - 2024	Kementerian Pertanian	1. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 2. Pemerintah Provinsi 3. Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Pelaku Usaha
		27.5. Membentuk kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO	Terbentuknya kelompok kerja sebagai wadah informasi dan konsultasi ISPO	2019-2022	Kementerian Pertanian	1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 3. Badan ...

Salinan sesuai dengan aslinya





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-71-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
28.	Penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO oleh pasar internasional	28.1. Menyusun strategi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Tersedianya strategi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	2020 - 2021	Kementerian Luar Negeri	1. Kementerian Perdagangan 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Badan Standardisasi Nasional

Selaman sesuai dengan aslinya



5. Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-72-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		28.2. Melakukan koordinasi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Terlaksananya koordinasi diplomasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	2020-2024	Kementerian Luar Negeri	1. Kementerian Perdagangan 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Badan Standardisasi Nasional 5. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 6. Pelaku Usaha

Salinan sesuai dengan aslinya

...

6. Pelaku ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-73-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		28.3. Menyusun strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Tersedianya strategi promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	2020 - 2024	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Luar Negeri 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Badan Standardisasi Nasional 5. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 6. Pelaku Usaha

28.4. Menyelenggarakan ...

Salinan sesuai dengan aslinya





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-74-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		28.4. Menyelenggarakan promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	Terselenggaranya promosi dan advokasi menuju keberterimaan ISPO di tingkat internasional	2020 - 2024	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Luar Negeri 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Badan Standardisasi Nasional 5. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 6. Pelaku Usaha

28.5. Melakukan ...

Salinan sesuai
dengan aslinya

2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-75-

No.	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
		28.5. Melakukan kerjasama dengan negara-negara konsumen melalui berbagai program	28.5.1. Terwujudnya kerjasama dengan negara-negara konsumen melalui berbagai program 28.5.2. Tercapainya kesepakatan dengan negara-negara importir menuju keberterimaan ISPO	2024	Kementerian Luar Negeri	1. Kementerian Perdagangan 2. Kementerian Pertanian 3. Badan Standardisasi Nasional 4. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 5. Pelaku Usaha

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



Satya Bhakti Parikesit